

TRANSNASIONALISASI JASA KEUANGAN

Deany Afriany dan Ahmad Jamaan

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Transnationalization of Financial Services in Southeast Asia. The purpose of this study was to determine how the expansion of the Bank in Malaysia by CIMB Niaga in Indonesia expansion and why it happens. The method used is the method kualitatif research with secondary data collection techniques through library research. Data were obtained and processed from books, journals, scientific articles and also websites that can be trusted. Hypotheses were analyzed using techniques derived explanations with comparative studies. The research was conducted with the unit of analysis mercantilist perspective Nation State. The results indicate a fundamental difference between the expansion of the Bank in Malaysia by CIMB Niaga in Indonesia due to regulatory differences in the two countries. Regulatory differences occurred because of differences in national interests of each country.

Abstrak: Transnasionalisasi Jasa Keuangan di Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ekspansi yang dilakukan Bank Mandiri di Malaysia dengan ekspansi CIMB Niaga di Indonesia dan mengapa hal tersebut terjadi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dan diolah dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan juga situs-situs yang dapat dipercaya. Hipotesa yang diturunkan dianalisa dengan menggunakan teknik eksplanasi dengan studi komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan perpektif merkantil dengan unit analisis Negara Bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar antara ekspansi Bank Mandiri di Malaysia dengan CIMB Niaga di Indonesia yang disebabkan karena perbedaan regulasi ke dua negara. Perbedaan regulasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan nasional setiap negara.

Kata kunci: Transnasionalisasi, ekspansi, regulasi, kepentingan nasional.

PENDAHULUAN

Transnasionalisasi jasa keuangan di Asia Tenggara khususnya pada sektor perbankan dewasa ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya lalu lintas perdagangan internasional. Saat ini perbankan di Asia Tenggara didominasi oleh perbankan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sebagai perusahaan perbankan transnasional, Singapura dalam hal ini Bank DBS telah memiliki banyak cabang di dunia, khususnya di Timur Tengah dan Asia. Khusus di Indonesia, PT. Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia) berdiri pada tanggal 30 Juni 1989 dengan nama PT Bank Mitsubishi Buana, satu usaha patungan antara The Mitsubishi Bank Ltd. dan PT Bank Buana Indonesia. Di tahun 1997, DBS Bank Ltd. mengakuisisi saham Mitsubishi Bank Ltd. di PT Bank Mitsubishi Buana dan menjadi PT Bank DBS Buana. Selanjutnya di bulan Oktober 2000 nama Bank berganti nama menjadi PT Bank DBS Indonesia. Demikian pula dengan Bank UOB,

yang masuk ke Indonesia setelah mengakuisisi Bank Buana Indonesia pada tahun 2007 dengan menjadi pemegang utama saham bank melalui OUB International Investment Private Limited (OUBII). Sedangkan OCBC masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi Bank NISP pada tanggal 06 Maret 2003.

DBS merupakan pemimpin pasar di Singapura dan terkemuka di wilayah Asia Tenggara. Saat ini DBS telah mengembangkan sayap bisnis di tiga sumbu utama pertumbuhan bisnis dunia, yaitu Cina, Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan jaringan bisnis di Amerika Serikat (AS), Inggris, Cina, Uni Emirat Arab, Indonesia, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina dan Vietnam. Saat ini DBS memiliki total aset per Desember 2011 sebesar S\$ 341 miliar. Sedangkan aset PT Bank DBS Indonesia tumbuh 160 persen lebih sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan aset ini disumbang dari pertumbuhan nasabah yang terus

meningkat dari tahun ke tahun yang meningkat lebih dari 8000 persen. Saat ini nilai aset mencapai Rp.30 triliun. DBS telah berencana menggabungkan Bank Danamon dengan melakukan akuisisi 67,37% saham Bank Danamon yang dimiliki Fullerton Holdings Pte Ltd (FFH) melalui Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd. Namun hal tersebut masih menunggu proses izin dari Bank Indonesia. Apabila proses akuisisi selesai dilaksanakan, maka hal tersebut berpotensi menjadikan bank DBS menjadi bank terbesar kelima di Indonesia.

Posisi negara kedua yang menjadi perusahaan perbankan terkemuka di Asia Tenggara adalah Malaysia melalui CIMB Group dan Maybank. CIMB Group yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, saat ini memiliki kantor regional di Singapura, Thailand dan Indonesia. Per Juni 2011 CIMB Group melalui CIMB Group Holdings Berhard memiliki kapitalisasi pasar mencapai US\$ 22 miliar. CIMB masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi Bank Niaga dan Bank Lippo yang pada bulan Juni 2008 resmi menjadi Bank CIMB Niaga. Saat ini CIMB merupakan bank terbesar kelima di Indonesia dengan aset mencapai Rp.164,25 triliun. Di bawah CIMB Group, CIMB Niaga memiliki visi sebagai bank regional di kawasan Asia Tenggara dan telah memiliki cabang di 9 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar dan Filipina. Sedangkan untuk perbankan Indonesia, salah satu perusahaan jasa keuangan yang telah menjadi perusahaan transnasional adalah Bank Mandiri. Sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia dengan aset lebih dari Rp500 triliun.

Dominasi perbankan di Asia Tenggara tersebut tidak lepas dari tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Berdasarkan data yang diperoleh, Singapura sebagai negara dengan pertumbuhan perekonomian tertinggi di kawasan Asia Tenggara mendominasi sektor perbankan di Asia Tenggara. Padahal kalau kita lihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Singapura berada jauh di bawah Indonesia dan Malaysia. Malaysia sendiri menduduki peringkat kedua dan Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam

dominasi perusahaan perbankan transnasional di Asia Tenggara.

Berbicara tentang perbankan Indonesia, terlihat jelas bahwa dominasi perbankan yang sahamnya dimiliki asing mencakup 6 (enam) bank dari total keseluruhan 10 bank terbesar, 2 bank merupakan bank milik Malaysia, 4 (empat) bank lainnya adalah merupakan bank BUMN. Dari kedua bank yang dikuasai oleh perbankan Malaysia di atas, kita melihat bahwa CIMB Niaga menempati urutan kelima sebagai bank terbesar di Indonesia, dengan aset mencapai Rp142,93 Triliun dengan pangsa pasar sebesar 4,7% pada tahun 2010. CIMB Niaga dikuasai oleh CIMB Group yang merupakan bank terbesar ketiga di Malaysia setelah Maybank dan Public Bank. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk dapat melihat transnasionalisasi perbankan Malaysia apabila kita bandingkan dengan perbankan Indonesia yang saat ini masih di pegang Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dengan aset sebesar Rp410,6 Triliun dengan pangsa pasar sebesar 13,6% pada tahun 2010.

Dengan kinerja yang terus meningkat tersebut, Bank Mandiri berusaha untuk mencapai visinya menjadi top 5 di ASEAN pada tahun 2014. Salah satu untuk mencapai visi tersebut adalah dengan memperluas pangsa pasar di Malaysia. Saat ini dengan jaringan *remittance* yang ada di Malaysia yang telah ada dari tahun 2009 ingin lebih dikembangkan. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Bank Mandiri mengajukan permohonan untuk membuka cabang penuh di Malaysia, namun Bank Sentral Malaysia hanya memberikan izin untuk membentuk anak usaha.

METODE

Sehubungan dengan permasalahan yang ingin dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini, maka perspektif yang digunakan adalah perspektif merkantilis. Hal ini disebabkan karena kajian penelitian terletak pada aktor negara bangsa sebagai unit analisis dengan tujuan kegiatan ekonomi politik internasional adalah memaksimalkan kepentingan nasional dan peran negara

yang primer dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Perpektif ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi selalu tunduk pada kepentingan politik dan kekuasaan. Apabila ingin merubah sistem ekonomi internasional yang tidak mendukung kepentingannya, suatu negara harus bisa merubah distribusi kekuatan politik internasional. Namun apabila negara lemah dan tidak mampu mempengaruhi sistem internasional, dalam perpektif ini menganjurkan agar pemerintah negara itu melakukan intervensi pasar demi melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Membiarkan pasar bebas berlaku, sementara posisi lemah, hanya akan menghancurkan diri sendiri (Mas'ood, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perbankan internasional dewasa ini meningkat pesat seiring dengan semakin meningkatnya perdagangan di dunia. Lalu lintas perdagangan internasional menuntut peranan perbankan yang lebih komprehensif sebagai penerima pembayaran ataupun pihak yang menjamin pembayaran. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara kawasan Asia Tenggara lainnya, perkembangan perbankan tidak lepas dari kemajuan ekonomi suatu bangsa itu sendiri. Krisis moneter yang menimpa kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997, membuat peta perbankan Indonesia berubah signifikan. Pada waktu itu “keran” masuknya investasi asing di sektor perbankan Indonesia sangat terbuka lebar. Negara Indonesia memerlukan banyak investasi asing demi kepentingan nasional menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Maka tidak heran banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk di antaranya investor dari Malaysia, Maybank dan CIMB Group.

Saat ini lebih dari satu dekade sejak krisis moneter yang terjadi tahun 1997, perbankan nasional Indonesia telah bangkit dan berusaha menjadi perbankan yang *go international*, khususnya Bank Mandiri sebagai BUMN Indonesia. Salah satu tujuan pengembangan usaha di luar negeri adalah membuka cabang di Malaysia. Namun ternyata upaya tersebut tidak ber-

langsung dengan mudah, karena negara Malaysia memiliki regulasi yang melakukan pembatasan terhadap masuknya perbankan asing di Malaysia. Penerapan sebuah regulasi tentu tidak lepas dari kebijakan ekonomi dan politik suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional merupakan suatu dasar dalam menentukan sebuah kebijakan.

Oleh karena itu, meskipun secara ekonomi dan perdagangan, kawasan Asia Tenggara telah memasuki babak penting dalam kerjasama regional, namun dalam hal sektor jasa keuangan khususnya perbankan belum terealisasi dengan baik. Belum adanya bank sentral di kawasan Asia Tenggara, menimbulkan perbedaan antara suatu negara dengan negara lain baik itu mata uang maupun regulasi/kebijakan yang diterapkan pada masing-masing negara anggota ASEAN. Mata uang yang berbeda pada setiap negara akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah seperti kurs devisa, risiko perubahan kurs, cadangan valuta asing dan sebagainya. Sedangkan regulasi/kebijakan menyebabkan perbedaan peraturan atau undang-undang terhadap sektor perbankan pada setiap negara anggota.

Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997, menyebabkan banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia mengalami krisis finansial yang cukup parah. Nilai tukar Rupiah, Ringgit, Baht dan mata uang negara Asia Tenggara lainnya terhadap Dollar AS jatuh terjerembab di bursa valas internasional. Efek dari jatuhnya mata uang negara-negara Asia Tenggara ini sangat luar biasa, seperti efek domino, mula-mula hanya berpengaruh terhadap sejumlah produk impor, tetapi kemudian menjalar ke berbagai sektor, melambungkan harga berbagai produk lokal, membangkrutkan ribuan perusahaan dan menyebabkan pengangguran ribuan tenaga kerja.

Untuk mengatasi krisis moneter tersebut pemerintah berusaha membuat regulasi atau kebijakan yang dianggap perlu untuk segera mengatasi krisis moneter tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia melalui otoritas perbankan adalah mengeluarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 yang disyahkan pada tanggal 10

November 1998 yang salah satu nya mengatur tentang kepemilikan asing terhadap perbankan di Indonesia sampai dengan 99%.

Hal ini dilakukan karena krisis moneter tidak saja menyebabkan nilai tukar rupiah merosot tajam dari Rp2500 per 1 dollar AS menjadi Rp15000 per 1 dollar AS, dan menimbulkan banyak perusahaan yang harus menanggung beban hutang yang sangat besar, namun adanya *rush* (penarikan uang) secara besar-besaran akibat kepanikan masyarakat menimbulkan gejolak pada dunia perbankan Indonesia. Tidak sedikit bank yang harus dilikuidasi dan atau di *merger*. Termasuk 4 bank pemerintah pada waktu itu yang harus di *merger* menjadi satu, yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor (EXIM), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 adalah:

- lemahnya fundamental ekonomi mikro
- tingginya hutang luar negeri (baik pemerintah maupun sektor swasta)
- pertumbuhan ekonomi yang negatif

Hal tersebut menjadikan *bargaining position* Indonesia dimata dunia internasional menjadi lemah. Ditambah lagi dengan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menimbulkan krisis politik di tanah air, sampai akhirnya menimbulkan pergantian pemerintahan Indonesia pada bulan Mei tahun 1998.

Hal ini juga yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menerima campur tangan asing

dalam hal ini melalui lembaga International Monetary Fund (IMF) dengan menerima paket bantuan sebesar US \$23 Milyar. Menerima bantuan pada hakekatnya adalah membuat “ketergantungan” kita kepada negara lain, dan sulit rasanya untuk dapat menentukan kebijakan kita sendiri.

Malaysia meskipun mengalami krisis moneter yang sama, namun secara fundamental ekonomi lebih kuat (meskipun secara keseluruhan GDP turun sebesar 6,2 %), dan rendahnya hutang luar negeri serta kebijakan PM Mahathir Muhammad yang menolak campur tangan IMF membuat ekonomi Malaysia pulih dengan cepat.

Malaysia dalam hal ini menerapkan sistim kurs tetap dengan kontrol devisa sejak September 1998. Sistim nilai tukar tetap (*fixed system*) atau pematokan terhadap mata uang negara lain (*pegged system*) dapat dilaksanakan dengan cara biasa atau melalui suatu Dewan Mata Uang. Yang terakhir, secara populernya dikenal sebagai *Currency Board System* (CBS). Selain itu dalam hal investasi asing, Malaysia juga membatasi masuknya investasi asing terutama dalam sektor perbankan.

Tabel 1 menunjukkan perbedaan regulasi perbankan Indonesia Malaysia dalam pembatasan kepemilikan asing pada sector perbankan. Bank Mandiri mulai melakukan ekspansi di Malaysia dengan membuka jaringan *remittance* (jasa pengiriman uang) dengan mendirikan anak perusahaan (*sub ordinary*) Mandiri International Remittance di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2009. Hal ini merupakan salah satu upaya Bank Mandiri untuk mengembangkan

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Perbankan Indonesia – Malaysia terhadap Pembatasan Kepemilikan Asing)

Indonesia	Malaysia
- Batasan Kepemilikan 99 %	- Batasan kepemilikan :30 % (institusi), 20% (individu)
- Tidak ada batasan Cabang	- Maksimum 12 Cabang (2 di kota besar, 4 di pinggiran kota, dan 6 di pedesaan)
- Tidak ada batasan ATM	- Tidak boleh menempatkan ATM diluar cabang
- Syarat minimum Rp3 Triliun (hanya untuk bank baru)	- Syarat modal minimum RM 300 Juta (100 Juta Dolar AS)

wilayah operasionalnya di kawasan Asia Tenggara. Selain untuk meningkatkan *fee based income* dari transaksi *remittance* dan memberikan pelayanan kepada seluruh tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2 juta orang, Mandiri International Remittance juga menyediakan jasa pengiriman uang kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai jaringan kantor di Malaysia. MIR juga akan bekerjasama dengan bank-bank Malaysia serta penyedia layanan *remittance* yang berada di negara tersebut untuk mengakomodir kebutuhan transaksi pengiriman uang.

Bisnis *remittance*, khususnya transaksi yang berasal dari TKI masih ditunjukkan data Bank Indonesia dimana pengiriman uang pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 37,33% dari US\$ 6 Miliar pada 2007 menjadi US\$ 8,24 Miliar. Sampai dengan September 2009, transaksi *remittance* Bank Mandiri mencapai angka 1,1 juta transaksi dengan total nilai sekitar USD 41,5 miliar. Transaksi *outgoing* mencapai 260 ribu transaksi dengan nilai USD 23 miliar (260 ribu transaksi) sementara transaksi *inco-ming* mencapai 825 ribu transaksi dengan total nilai USD 18,5 Miliar.

Selain bisnis *remittance*, Bank Mandiri berkeinginan untuk membuka *full branch* di Malaysia. Hal ini dikemukakan Direktur Finance & Strategic Bank Mandiri Pahala N Mansury di Jakarta. Lebih lanjut Pahala menyebut jika bisnis Bank Mandiri di Malaysia saat ini hanya fokus di *remittance office* saja untuk transaksi pengiriman uang ke Indonesia. “Kami memang berharap izin yaitu bisa buka anak perusahaan di Malaysia di bidang perbankan, terutama di bidang retail dan bisa menyalurkan kredit secara retail juga,” jelasnya. Namun, Pahala pun menyadari kendala yang harus dilalui Bank Mandiri jika ingin beroperasi penuh di Malaysia. Untuk itu, Bank Mandiri pun telah meminta secara khusus mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihaknya. “Kami harap target permodalan yang mencapai 300 juta ringgit yang disyaratkan aturan Malaysia bisa dipenuhi secara bertahap dan bisa sesuai dengan profitabilitas dan kecakapan usaha kami di sana,” tambahnya.

Selain masalah permodalan, kendala lain yang harus dilalui Bank Mandiri adalah mengenai jumlah cabang. “Kami ingin diberikan fleksibilitas untuk pembentukan kantor cabangnya, berapa banyak yang didirikan dan cabangnya di mana saja,” ujar Pahala. Hal tersebut pun telah diungkapkan pihak Bank Mandiri ke otoritas di Malaysia.

Ekspansi CIMB Group di Indonesia mulai dilakukan sejak bulan November 2002, ketika Commerce Asset-Holding Berhard (CAHB) mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank Niaga sendiri merupakan salah satu bank swasta nasional yang telah berdiri pada tanggal 26 September 1955. Pada tahun 1987, Bank Niaga merupakan bank pertama yang memberikan layanan ATM (*Automatic Teller Machine*) pada perbankan nasional Indonesia. Dan pada tahun 1991 memberikan layanan perbankan online pertama di Indonesia.

Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989. Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian reorganisasi internal untuk menkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking. Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008. Sejak dikeluarkannya kebijakan *Single Presence Policy* (SPP) oleh Bank Indonesia, Bank Niaga dan LippoBank di *merger* menjadi PT CIMB Niaga, Tbk Resmi pada tanggal 1 November 2008 di ikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas.

Dengan bergabungnya Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara. Penggabungan ini menjadikan Bank CIMB Niaga menjadi bank terbesar ke lima di Indonesia dengan total asset Rp179,42 triliun dan berhasil

meraih laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,98 triliun pada semester I 2012. Bahkan asset Bank CIMB Niaga semakin meningkat tajam dari sebesar Rp22,957 Triliun pada tahun 2001 menjadi Rp143,65 Triliun pada tahun 2010 meningkat sebesar 627 % dalam kurun waktu 10 tahun. Tabel 2 berikut menunjukkan perkembangan asset CIMB Niaga dari tahun 2001 sampai tahun 2010.

Tabel 2. Perkembangan asset PT Bank CIMB Niaga Tbk Periode 2001-2010

Tahun	Total Asset
2001	22.957.000
2002	22.837.562
2003	23.749.329
2004	30.798.312
2005	41.579.861
2006	46.544.346
2007	93.797.189
2008	103.197.574
2009	107.104.274
2010	143.652.852

Sumber: Laporan Keuangan CIMB Niaga 2010

Demikian juga dengan laba yang diperoleh CIMB Niaga meningkat pesat dari Rp203 Milyar pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp2,56 Triliun pada tahun 2010 seperti ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan Laba Setelah Pajak PT Bank CIMB Niaga Tbk Periode 2001-2010

Tahun	Lab a setelah Pajak
2001	203,000
2002	141,119
2003	467,255
2004	658,840
2005	546,035
2006	647,806
2007	1,510,527
2008	678,072
2009	1,575,328
2010	2.562,553

Sumber: Laporan Keuangan CIMB Niaga 2010

Untuk dapat melihat perbedaan antara ekspansi Bank Mandiri di Malaysia dengan CIMB

Niaga di Indonesia dapat kita lihat dalam Tabel 4. Perbedaan ekspansi Bank Mandiri di Malaysia dan CIMB Niaga di Indonesia seperti digambarkan dalam tabel dapat menimbulkan dampak baik secara ekonomi dan politik bagi Indonesia dan Malaysia.

Dari segi layanan perbankan, ekspansi CIMB Niaga di Indonesia dengan layanan *full branch* (layanan penuh sebagai Cabang, yaitu tabungan, deposito, giro, kredit dan layanan perbankan lainnya) memberikan keleluasaan gerak bagi perbankan Malaysia untuk memasuki semua sektor ekonomi di Indonesia. Mulai dari mengumpulkan dana dari masyarakat, mengelolanya dan menyalurkan ke sektor-sektor lainnya. Penulis ingat, sebelum Bank Niaga di akuisisi oleh CIMB Group, pada waktu itu seluruh transaksi perbankan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dilakukan melalui Bank Mandiri baik itu transaksi dalam mata uang Valas dan Rupiah. Namun sejak CIMB Group mengakuisisi Bank Niaga, seluruh transaksi PT CPI tersebut beralih ke CIMB Niaga. Saat ini layanan Bank Mandiri kepada PT CPI hanya sebatas pada layanan *Payroll* Gaji Pegawai. Hal ini tentu saja, tidak hanya “merugikan” Bank Mandiri saja, tapi porsi perbankan nasional secara keseluruhan. Itu baru dari satu contoh kasus. Belum lagi efek terhadap seluruh rekanan PT CPI yang tadinya ber-bank di Bank Mandiri, secara otomatis mereka juga memindahkan transaksinya ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk kemudahan pembayaran.

Sedangkan, ekspansi Bank Mandiri di Malaysia, layanan hanya sebatas jasa pengiriman uang. Bank Mandiri tidak dapat menerima dana dari masyarakat, apalagi untuk mengelola dan menyalurkannya. Peranan Bank Mandiri terbatas sebagai “kurir”. Sehingga bagi perbankan Malaysia, Bank Mandiri bukanlah suatu ancaman bagi eksistensi bank bank di Malaysia. Bagi Indonesia, kehadiran CIMB Niaga merupakan ancaman bagi perbankan nasional. Hal ini terbukti pangsa pasar Bank Mandiri mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar hampir 3%.

Dari segi layanan Cabang, ekspansi Bank CIMB Niaga telah merambah seluruh wilayah

Tabel 4. Perbedaan Ekspansi Bank Mandiri dan CIMB Niaga

Bank Mandiri di Malaysia	CIMB Niaga di Indonesia
- Bentuk usaha : <i>sub ordinary</i> (Mandiri International Remittance)	- Bentuk usaha : PT, Tbk (PT CIMB Niaga, Tbk)
- Layanan Perbankan : Jasa pengiriman uang	- Layanan Perbankan : (<i>Full Branch</i>) Tabungan, Deposito, Giro, Kredit dll.
- Jumlah Cabang : 8	- Jumlah Cabang : 675
- Jumlah ATM : Tidak ada	- Jumlah ATM : 1900 Unit

Indonesia dengan total 675 Cabang. Hal ini menyebabkan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi di semua Cabang CIMB Niaga di Indonesia. Kemudahan akses merupakan poin utama bagi sebuah bank untuk dapat mengembangkan produk mereka sehingga dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Termasuk di antaranya layanan ATM (*Automatic Teller Machine*) CIMB Niaga yang telah mencapai lebih dari 1900 atm yang tersebar di seluruh lokasi di Indonesia.

Dibandingkan dengan cabang *remittance* Bank Mandiri yang baru berjumlah 8 Cabang di seluruh wilayah Malaysia, dan tanpa layanan ATM sama sekali. Hal ini akan menyulitkan masyarakat (Indonesia, khususnya) dalam hal bertransaksi. Karena masih banyak para TKI yang mengirim uang ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Jangankan untuk memberikan layanan bagi masyarakat Malaysia, seperti yang dilakukan oleh CIMB Niaga di Indonesia, melayani para TKI pun Bank Mandiri belum dapat melakukan sepenuhnya.

Muara dari semua perbedaan tersebut, adalah laba yang diperoleh oleh Bank Mandiri dan CIMB Niaga. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada laba bersih (*Net Interest Margin*) yang diperoleh CIMB Niaga pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp2,562 Triliun.

Secara ekonomi, “kue” perbankan nasional sudah dinikmati oleh negara lain, dengan mencatat pertumbuhan laba yang signifikan tiap tahunnya dan mengalir keluar Indonesia. Makin tumbuh perekonomian Indonesia, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang dinikmati oleh bangsa lain. Sedangkan Indonesia hanya mendapatkan bagian kecil dari ekonomi negara

lain, itu pun merupakan hasil jerih payah bangsa kita sendiri yang bekerja di Malaysia.

Secara politik, meskipun hubungan Indonesia Malaysia tetap berlangsung baik selama ini, namun “kedaulatan” sebagai bangsa yang besar, semakin lama semakin memudar. Sudah banyak klaim Malaysia terhadap wilayah teritorial Indonesia, termasuk budaya dan kesenian Indonesia yang diakui sebagai bagian dari Malaysia. Rasa nasionalisme melalui cinta produk Indonesia, khususnya di sektor perbankan akan semakin hilang. Masyarakat Indonesia tidak lagi akan memilih bank “plat merah”, sebagai pilihan utama mereka, namun pelayanan dan kemudahan akses yang sekarang menjadi poin utama. Maka tidak heran, Bank Mandiri dalam hal ini terus ber upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya, dengan menjadi *Best Service Excellent* selama lima tahun berturut-turut.

Kedaulatan sebagai suatu bangsa dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politik yang didasari oleh kepentingan nasional pun tidak lepas dari pengaruh asing. Hal ini terlihat ketika perbankan nasional dalam hal ini Bank Mandiri dan bank BUMN lainnya meminta kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di tanah air, untuk menerapkan prinsip *resiprositas* bagi perbankan asing, demi melindungi perbankan nasional Indonesia dari dominasi perbankan asing, belum dapat diakomodir oleh pemerintah dan DPR sebagai pembuat regulasi.. Padahal fakta yang terjadi di lapangan sudah jelas menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang batasan kepemilikan asing di Indonesia, maka perbankan nasional dibiarkan “berperang” sendiri menghadapi kekuatan besar serbuan asing di Indonesia.

Bahkan negara Malaysia dan Singapura sendiri menerapkan batasan terhadap perbankan asing yang akan masuk ke negara mereka dengan aturan yang berat dan berjenjang.

SIMPULAN

Perbedaan regulasi yang diterapkan oleh otoritas perbankan Indonesia menyebabkan ekspansi perbankan Malaysia (dalam hal ini melalui CIMB Group) di Indonesia terjadi dengan sangat mudah bahkan berhasil meningkatkan kinerja dan pendapatan CIMB Niaga dari tahun ke tahun sehingga menjadikan CIMB Niaga sebagai bank terbesar ke lima di Indonesia. Dan sebaliknya ekspansi perbankan Indonesia (dalam hal ini melalui Bank Mandiri) harus melalui berbagai proses yang menyebabkan rencana Bank Mandiri untuk dapat membuka *full branch* di Malaysia sampai saat ini belum dapat terealisasi. Meskipun secara politik dan ekonomi telah terjalin hubungan yang baik antara Indonesia – Malaysia, baik itu hubungan bilateral maupun hubungan yang terjalin melalui Asean Economic Community yang telah digagas sejak tahun 2007, dan sebagai Negara anggota WTO yang memiliki prinsip resiprositas namun regulasi pembatasan kepemilikan asing di perbankan Malaysia belum bergeming sejauh ini sehingga tetap menghambat upaya ekspansi Bank Mandiri di Malaysia.

Dalam hal ini peranan pemerintah sangat di perlukan karena sebagai pembuat regulasi, sudah saatnya pemerintah melakukan revisi terhadap UU Perbankan untuk melindungi perbankan Indonesia dari dominasi pihak asing. Seperti yang di lakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk terus melindungi sektor perbankan mereka dari dominasi asing, bahkan terus mendorong perbankan nasional mereka untuk menjadi perusahaan transnasional di Asia Tenggara.

DAFTAR RUJUKAN

- Jamaan, Ahmad, 2010, *Growth Triangle Indonesia Malaysia Thailand*, Pekanbaru: Unri Press.
- Deliarnov, 2006. *Ekonomi Politik Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Erlangga
- F, Efantino & S, Arifin, 2009. *Ganyang Malaysia: Hubungan Indonesia-Malaysia Sejak Konfrontasi Sampai Konflik Amblat*, Yogyakarta: Bio Pustaka
- Huala, Adolf A.Chandrawulan, 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Julius R, Latumaerissa, 1996. *Esensi-Esensi Perbankan Internasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jack,C.Planto,and Roy,Olton, *International Relations Dictionary*, Terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, 1982
- Mohtar, Mas'oed, 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mudrajad, Kuncoro, 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Richard, E. Feinverg, 1993. *Peranan Bank Umum (Bank Komersial) di Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudargo,Gautama, 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- T. May, Rudy, 2007. *Ekonomi Politik Internasional Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*, Bandung: Nuansa.
- Yuli, Fachri, "Politik Luar Negeri Malaysia Setelah Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan", *Tesis*, PPS Universitas Riau, 2011.